

PENTINGNYA TATA KELOLA INFORMASI PADA ORGANISASI PUBLIK

Anita Tri Widiyawati

Program Studi Ilmu Perpustakaan, Jurusan Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

E-mail: anitatriw@ub.ac.id

Abstract

Information governance is currently being echoed in the field of administrative organization. along with the development of information technology and internet networks that no longer provide time and space limits for each individual in communicating and accessing information. In a public organization, especially in government in the current digitization era, access to public information really needs to be developed and managed access. Information governance encourages the openness of the state apparatus in providing information management and data management services as well as more systematic transparency and accountability of the bureaucratic process. The application of an information governance must be in accordance with the rights and decision specifications and the accountability framework. the aim is to ensure compliance with the assessment, creation, storage, use, archiving and deletion of information in a public organization.

Keywords: *governance, information, public organizations.*

Abstrak

Tata kelola informasi pada saat ini sudah mulai didengungkan dalam bidang organisasi administrasi. seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan jaringan internet yang sudah tidak lagi memberikan batas ruang dan waktu bagi setiap individu dalam berkomunikasi dan mengakses sebuah informasi. Dalam suatu organisasi publik khususnya di pemerintahan pada era digitalisasi saat ini, kemudahan mendapatkan informasi publik sangat perlu dikembangkan dan dikelola aksesnya. *Information governance* mendorong keterbukaan aparatur negara dalam memberikan layanan pengurusan informasi dan pengelolaan data serta transparansi dan akuntabilitas proses birokrasi semakin sistematis. Penerapan sebuah tata kelola informasi, harus sesuai dengan spesifikasi hak dan keputusan serta kerangka akuntabilitasnya. tujuannya untuk memastikan sesuai dalam penilaian, pembuatan, penyimpanan, penggunaan, pengarsipan dan penghapusan informasi pada suatu organisasi publik.

Kata kunci: tata kelola, informasi, organisasi publik.

Pendahuluan

Istilah *information governance* semakin berkembang. Pada dasarnya *information governance* dapat dilihat dari sudut pandang institusi atau organisasi publik dan organisasi privat. Pada artikel ini lebih menekankan pada organisasi publik, seperti pemerintahan. *Governance* merupakan hal yang berkaitan dengan tata kelola, pengelolaan, dan pengurusan. Sehingga *information governance* berkaitan dengan tata kelola, pengelolaan, dan pengurusan informasi. Di dalam Organisasi publik mencakup kegiatan administrasi.

Administrasi berasal dari istilah *administration* mengandung berbagai makna dan pengertian mulai dari yang paling sempit sampai pada yang paling luas yang semuanya sekaligus dapat ditemukan dalam suatu lingkungan tertentu yang disebut organisasi. Organisasi bersifat lengkap dan mengandung seluruh unsur administrasi yang disebut juga dengan organisasi administrasi Sherwood (dalam Zainun, 2004:9). Dalam arti sempit, administrasi berarti urusan yang bersangkutan-paut dengan pekerjaan tulis-menulis. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut juru tulis. Masih dalam pengertiannya yang terbatas tersebut namun sudah agak meluas bilamana administrasi diartikan sebagai tata usaha atau pekerjaan perkantoran. Begitu luasnya pekerjaan tata usaha atau perkantoran ini sehingga membutuhkan seorang yang harus memimpin pekerjaan kantor.

Berdasarkan organisasi administrasi perkantoran yang telah dijelaskan menunjukkan adanya juru tulis. Sehingga hal ini menyangkut pencipta arsip dalam tata kelola informasi. Sedangkan adanya pemimpin pekerjaan kantor menyangkut pengambil kebijakan dalam tata kelola informasi. Sehingga sangat penting adanya pengelolaan informasi pada organisasi publik.

Pengelolaan informasi pada organisasi publik berhubungan dengan tata kelola informasi yang ada pada lembaga publik. Tata kelola informasi ini menyangkut kebijakan informasi pada lembaga publik dan teknis dari kebijakan informasi itu sendiri.

Sesuai dengan pendapat Thomas (2000:796) tata kelola sebagai jumlah dari banyak cara individu dan institusi publik atau swasta dalam mengelola urusan dan merupakan proses berkelanjutan untuk sebuah pengambilan tindakan yang saling bertentangan. Jadi dalam tata kelola informasi pada organisasi publik sebaiknya ada kebijakan. Kebijakan menurut Chapman dalam Hendrawati (2014:11) adalah pernyataan formal yang mewujudkan maksud dan tujuan suatu organisasi yang meliputi rentan waktu 5 sampai 10 tahun. Adanya rentan waktu sebuah kebijakan membuat sebuah aturan yang sesuai dengan perkembangan keadaan organisasi.

Berdasarkan penerapan sebuah tata kelola informasi, spesifikasi hak dan keputusan serta kerangka akuntabilitas untuk memastikan sesuai dalam penilaian, pembuatan, penyimpanan, penggunaan, pengarsipan dan penghapusan informasi, yang meliputi: (a) kebijakan dalam tata kelola informasi pada organisasi publik, (b) teknis tata kelola informasi dalam menciptakan dan pengelolaan informasi, dan (c) proses penilaian informasi, pembuatan informasi, penyimpanan informasi, penggunaan informasi, pengarsipan informasi dan penghapusan informasi.

Penerapan tata kelola informasi termasuk ke dalam semua proses dari awal penciptaan sampai akhir bagian yaitu penghapusan informasi. Menurut pendapat Gartner (2007) dalam Lies (2013:1) adalah tata kelola informasi sebagai spesifikasi keputusan hak dan kerangka kerja akuntabilitas untuk memastikan perilaku yang sesuai dalam penilaian, penciptaan, penyimpanan, penggunaan, pengarsipan, dan penghapusan informasi. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan manajemen arsip statis dan arsip dinamis.

Informasi didahului oleh peristiwa (Sulistyo Basuki, 2003:3). Banyak peristiwa yang terjadi pada organisasi publik. Peristiwa ini diwakili dalam bentuk simbol. Simbol yang disusun menurut peraturan dan konvensi yang mapan merupakan data. Data ini dapat berupa data numerik (angka), tekstual (berupa huruf),

audio berupa suara atau bunyi, video berupa gambar, citra atau gabungan antara dua jenis data atau lebih. Sebuah data tidak akan bermakna jika tidak dikaitkan dengan konteks sehingga menghasilkan informasi. Di mana informasi tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik. Bagaimana dirumuskan dalam kebijakan tata kelola informasi dan penerapan atau teknis dari kebijakan itu sendiri.

Pembahasan

Tata kelola menurut Saltaji (2018:56) adalah “governance means the existence of a system that governs relations between the parties and the members of the Board of Directors, management, and executive” yang artinya tata kelola sebagai sistem yang mengatur hubungan antara Dewan Direksi, Manajemen, dan Lembaga Eksekutif dalam sebuah organisasi. Menurut Thomas (2000:796) tata kelola sebagai jumlah dari banyak cara individu dan institusi publik atau swasta dalam mengelola urusan dan merupakan proses berkelanjutan untuk sebuah pengambilan tindakan yang saling bertentangan. Sedangkan menurut Banhart (1989:921) dalam (Iskandar, 2008) merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *governance* (pemerintahan) dan *control* (pengendalian).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tata kelola dibagi menjadi dua kata yaitu tata dan kelola. Tata artinya aturan dan kelola yaitu mengendalikan, mengurus, dan menjalankan. Definisi tata kelola juga dikemukakan oleh Chhotary (2009:3) tata kelola adalah sebuah aturan pengambilan keputusan secara kolektif di mana adanya pemahaman atas keberagaman antara individu ataupun organisasi yang tidak ada dalam pengendalian formal. Dari keempat pendapat tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa tata kelola adalah cara individu dan institusi publik atau swasta dalam mengatur hubungan antara Dewan Direksi, Manajemen, dan Lembaga Eksekutif untuk sebuah pengambilan keputusan secara kolektif yang saling bertentangan.

Governance apabila ditinjau dari etimologi dapat dilacak sebagai kata kerja dari Bahasa Yunani *kubernân* yang berarti mengarahkan (Kjaer dalam Kurniawan, 2012:19). Kata *kubernân* dipergunakan oleh Plato sebagai proses pembentukan sistem hukum. Kata *kubernân* ini berubah dan menjadi *gubernare* pada bahasa Latin di abad pertengahan yang juga berarti mengarahkan. Kata *gubernare* inipun diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi *governance* atau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan atau pengurusan (Kurniawan, 2012:20).

Bila meninjau dari makna *governance* sebagai proses mengarahkan atau mengelola ataupun juga mengurus maka terdapat organisasi yang dikelola atau diarahkan atau dikelola dan diurus. Sedangkan organisasi yang dikelola atau diarahkan tersebut selaras dengan tujuan didirikannya organisasi itu sendiri. Dalam hal ini, *governance* sebagai terminologi umum dapat dipergunakan di berbagai bentuk organisasi atau institusi baik institusi publik maupun privat dengan perbedaan tujuan yang tegas. Organisasi publik seperti pemerintahan memiliki tujuan pelayanan terhadap masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan. Berbeda dengan organisasi privat yang tujuan dibentuknya adalah untuk memperoleh keuntungan atau profit (Kurniawan, 2012:20).

Coursey dan Bozeman, dalam Haque (2001) menegaskan bahwa “tidak ada hal yang lebih penting mengenai teori organisasi publik daripada segi alamiah atas ‘publik’ itu sendiri dalam organisasi publik (*publicness*). Segi alamiah atas publik itu sendiri sangat erat kaitannya dengan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam organisasi publik sebagai sasaran dari pelayanan publik. Hal ini juga berhubungan dengan kebijakan publik. Thomas Dye (dalam Abidin, 2012:5-6) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich.

Easton (dalam Abidin, 2012:6) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat.

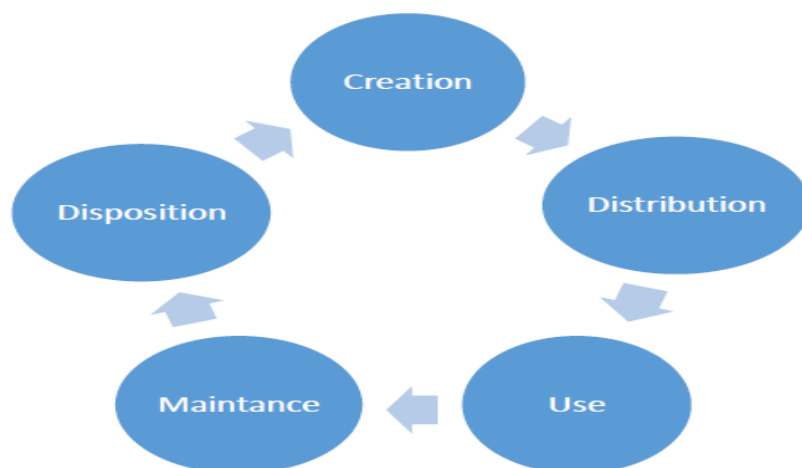
Tata kelola informasi (*Information Governance*) menurut Gartner (2007) dalam Lies (2013:1) adalah tata kelola informasi sebagai spesifikasi keputusan hak dan kerangka kerja akuntabilitas untuk memastikan perilaku yang sesuai dalam penilaian, penciptaan, penyimpanan, penggunaan, pengarsipan, dan penghapusan informasi. Ini termasuk proses, teknis, peran dan kebijakan, standar dan metrik yang memastikan penggunaan informasi yang efektif dan efisien dalam memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

Tata kelola informasi pada organisasi publik merupakan hal-hal pengelolaan atau pengurusan informasi pada institusi publik (pemerintahan) yang dimulai dari kebijakan publik. Pengertian publik dalam rangkaian kata kebijakan publik memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat dan umum (Abidin, 2012:7). Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang resmi, sehingga

mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian publik di sini adalah masyarakat.

Manajemen Arsip

Tata kelola informasi terdapatnya manajemen arsip di setiap dokumen tercetak atau digital. Manajemen arsip menurut Handoyo (2014:1) adalah pengelolaan arsip/dokumen dan bertanggung jawab terhadap eksistensi arsip/dokumen, keamanan, pengendalian dan kontrol arsip/dokumen, *update database* serta melakukan pengolahan data dan informasi. Saling keterkaitannya tata kelola informasi dengan manajemen arsip pada proses pembentukan informasi. Pendapat lain dari Sulisty Basuki (2004:19) terkait manajemen arsip yaitu pengendalian sistematis terhadap semua rekod, mulai dari penciptaan atau penerimaan dan selanjutnya pemrosesan, distribusi, organisasi, penyimpanan dan temu kembali, hingga disposisi terakhir. Berdasarkan kedua pendapat di atas tata kelola informasi dan manajemen arsip memiliki proses yang sama yaitu terkait dengan penilaian, pembuatan, penyimpanan, penggunaan, pengarsipan dan penghapusan informasi. Berikut siklus tata kelola informasi dan manajemen arsip menurut Judith (2008:19):



Gambar 1. Siklus Informasi dan Arsip
Sumber: *Record Management* (2008)

Siklus informasi dan arsip di atas yang dimulai dari membentuk (*creation*) atau membuat informasi dari data yang telah dikumpulkan baik dari luar ataupun dari dalam organisasi. Selanjutnya menyebarkan (*distribution*) informasi kepada pengguna internal dan pengguna eksternal. Setelah terjadinya penyebaran (*distribution*) informasi akan digunakan (*use*) oleh pengguna sebagai referensi dan mengambil sebuah keputusan, dengan digunakan informasi oleh pengguna perlu adanya pemeliharaan (*maintenance*) dengan cara menyimpan *file* informasi serta membentuk keamanan. Hasil dari manajemen arsip yang digunakan oleh masyarakat ataupun kelompok tertentu (*Stakeholder*). *Stakeholder* menurut Wheelen dan Hunger dalam Wibisono (2007:53) adalah pihak-pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung ataupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Selanjutnya pada bagian terakhir adalah sebuah tindakan yang diambil oleh organisasi untuk memindahkan data informasi sebagai pusat informasi ataupun tindakan kedua yaitu menghapus informasi.

2. Tantangan Tata Kelola Informasi

Penerapan tata kelola informasi pada organisasi publik memiliki tantangan baik dari internal ataupun eksternal. Tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Faktor yang mempengaruhi tantangan dibedakan menjadi dua pertama yaitu faktor tantangan internal yang diakibatkan keadaan dalam organisasi, kedua adalah faktor eksternal yang diakibatkan keadaan dari luar organisasi. Tantangan secara umum yang akan dihadapi oleh organisasi publik adalah:

- a) kompleksitas dan kuantitas informasi meningkat; dan
- b) digitalisasi dan interaktivitas di organisasi publik meningkat.

Sebuah organisasi publik pada saat ini sebagai institusi pemerintahan seluruh masyarakat harus lebih beroperasi semakin cepat dan luas dalam penyebaran informasi. Sebagai tujuan memperluas informasi hal yang harus dilakukan oleh organisasi publik adalah membentuk sarana informasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Sedangkan untuk mempermudah penyebaran informasi, organisasi publik harus membentuk kuantitas informasi dengan format digital yang diberikan kepada masyarakat. Pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan internal yang meliputi pembentukan organisasi publik sebagai organisasi yang memiliki sarana informasi dalam bentuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat, serta berusaha beroperasi secara global dengan membentuk kuantitas dan kualitas informasi yang baik. Sedangkan tantangan eksternal dalam organisasi publik adalah bagaimana memberikan layanan yang telah ada kepada masyarakat agar digunakan dengan efektif dan efisien untuk memperoleh informasi.

Kesimpulan

Organisasi publik sangat erat kaitannya dengan administrasi organisasi. Di dalam kegiatan administrasi terdapat administrasi secara sempit dan administrasi secara luas. Administrasi secara sempit berkaitan dengan tulis-menulis yang dilakukan oleh juru tulis. Sedangkan administrasi secara luas terkait dengan perumusan dan pengambilan kebijakan. Juru tulis merupakan pencipta arsip, dan dibutuhkan adanya kebijakan tata kelola informasi terhadap apa yang diciptakan oleh juru tulis. Sehingga sangat penting adanya tata kelola informasi pada organisasi publik terkait kebijakan tata kelola informasi dan teknis penerapannya. Teknis penerapan di sini menyangkut penciptaan dan pengelolaan informasi, dan proses penilaian informasi, pembuatan informasi, penyimpanan informasi, penggunaan informasi, pengarsipan informasi dan penghapusan informasi.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Chhotray, Vashuda. 2009. *Governance Theory and Practice: A Cross-Disciplinary Approach*. England: Palgrave Macmillan melalui http://e-resources.perpusnas.go.id:2402/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzI4NjA3OV9fQU41?sid=ce0bf4a5-706c-4423-b3b8-22cc0547e060@pdc-v-sessmgr02&vid=8&format=EB&lpid=lp_1&rid=0 diakses 2 Januari 2020.
- Handoyo, Widhi. 2014. *Manajemen Kearsipan Modern*. Jakarta: Universitas Terbuka melalui 1 Januari 2020.
- Haque, M. Shamsul. 2001. *The Diminishing Publicness of Public Service Under the Current Mode of Governance*. *Public Administration Review*, 61:65-82
- Iskandar, Michael. 2008. *Kajian Atas Tatakelola Teknologi Informasi: Pengertian, Panduan, Panduan, Serta Contoh Penerapan*. *E-journal Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Vol 12, No 1* melalui <http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/47371> diakses 2 Januari 2020.
- Judith, Read. 2008. *Record Management*. USA: South Western Cengage Learning
- Kurniawan, Wahyu. 2012. *Corporate Governance: Dalam Aspek Perusahaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Lies, Howard Robert. 2013. *Information Governance: A Brief Introduction*. *New Zealand Focus*, Hal 1-7 melalui https://www.researchgate.net/publication/264742401_Information_Governance_A_Brief_Introduction_-_New_Zealand_Focus diakses pada 2 Januari 2020.
- Saltaji, Issam M. F. 2018. *Corporate Governance: A General Review*. *Internal Auditing and Risk Management Vol.13: Perpustakaan Nasional* melalui <http://e-resources.perpusnas.go.id:2402/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=754ee803-a678-4837-bcb1-eb8233356dc8%40pdc-v-sessmgr06> diakses 1 Januari 2020.
- Sulistyo Basuki. 2003. *Manajemen Arsip Dinamis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistyo Basuki. 2004. *Pengantar Dokumentasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Thomas G Weiss. 2000. *Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges*. *Third World Quarterly*, Volume 21 No 5 melalui <https://e-resources.perpusnas.go.id:2082/docview/219809104/630CE3B8993C4C9EPQ/2?accountid=25704> diakses 1 Januari 2020.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing. Gresik.
- Zainun, Buchari. 2003. *Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintah Negara Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.